



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN

LKjIP

2024





IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini, jumlah Sasaran Strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja **Urusan Pangan** sebanyak 2 Sasaran Strategis dengan 2 Indikator Kinerja dan **Urusan Pertanian** sebanyak 1 Sasaran Strategis dengan 1 rincian Indikator Kinerja dengan tingkat pencapaian sebagai berikut :

Urusan Pangan :

- Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yaitu dengan indikator kinerja berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan target 63,27 dan capaian kinerja 66,29 atau 104,77% dengan kategori Sangat Baik.
- Sasaran Startegis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yaitu dengan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP dengan target 75 dan capaian kinerja 86,35 atau 115,13 % dengan kategori Sangat Baik

Urusan Pertanian :

- Sasaran Stratregis Meningkatnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yaitu:



- Indikator kinerja berupa Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Harga Berlaku dengan target 3.996,25 dan capaian kinerja 4.276,26 atau 107,01% dengan Kategori “Sangat Baik”.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan rencana pendapatan/penerimaan yang menjadi sumbangsih untuk retribusi daerah (PAD) sebesar Rp.133.906.900,-. Target capaian penerimaan dari retribusi yaitu sebesar Rp. 385.387.254,-atau sekitar 34.75 %.

Jumlah alokasi anggaran Belanja Operasi untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2024 Pagu anggaran APBD-P sebesar Rp. 41,500,804,244,- dan realisasi anggaran 2024 sebesar Rp. 29.519.809.569,- atau 71,13 % dengan realisasi fisik sebesar 91,34 %.

Tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 4.229.675.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.050.242.630,- atau 95.76% dan realisasi fisik 100,00%.

Sedangkan untuk anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar RP. 1.566.615.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.076.849.818,- atau 68,74 % dan realisasi fisik 100,00 %.

Memperhatikan tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komperhensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan ini Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan amanat dan tuntutan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government, terutama juga dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2024, yang didasarkan pada Penetapan Kinerja tahun 2024, dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Laporan kinerja disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodic yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah



untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara optimal. Secara substantif laporan ini menggambarkan kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2024. Laporan ini merupakan sarana untuk mewujudkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Akhir kata, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terbuka dan transparan dan digunakan sebagai dokumen serta bahan masukan bagi perbaikan atau koreksi kegiatan di masa yang akan datang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua, kami berharap pada akhirnya dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan mewujudkan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Dr. RIKA AZMI, S.TP, MM
NIP. 19741208 200212 2 005



DAFTAR ISI

	Halaman
Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	6
1.5 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	9
1.6 Isu Strategis	12
1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	26
2.4 Indikator Kinerja Utama	31
2.5 Perjanjian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	40
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	43
3.3 Realisasi Anggaran	81
BAB IV PENUTUP	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2024	10
Tabel 1.3.	Aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	11
Tabel 1.4.	Permasalahan Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	12
Tabel 2.1.	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian misi ke – 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2026.....	22
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026	24
Tabel 2.3.	Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.....	26
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas KetahananPangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	32
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	36
Tabel 2.6.	Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2024.....	37
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	45
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	45
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	49
Tabel 3.4.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	50
Tabel 3.5.	Perkembangan Produktifitas Padi, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (kwintal/ha) 2021-2024.....	50
Tabel 3.6.	Sebaran Jumlah Produksi Padi menurut Kabupaten/ Kota (Ton)	51
Tabel 3.7.	Sebaran Jumlah Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)	51
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	53



Tabel 3.9.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)	54
Tabel 3.10.	Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	55
Tabel 3.11.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman perkebunan (%).....	58
Tabel 3.12.	Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024.....	59
Tabel 3.13.	Produksi Tanaman Perkebunan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.....	60
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak.....	62
Tabel 3.15.	Perkembangan Populasi Ternak tahun 2018-2024	62
Tabel 3.16.	Populasi Ternak di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024.....	62
Tabel 3.17.	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan	64
Tabel 3.18.	Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan	66
Tabel 3.19.	Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Riau	67
Tabel 3.20.	Perkembangan Capaian Kinerja Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen ditingkat Konsumen selama 6 tahun terakhir.....	68
Tabel 3.21.	Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2024	68
Tabel 3.22.	Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Ton/Tahun)	70
Tabel 3.23.	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi panganyang seimbang dan aman.....	72
Tabel 3.24.	Perkembangan Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman selama 5 tahun terakhir.....	73
Tabel 3.25.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman.....	75
Tabel 3.26.	Kategori Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.....	78
Tabel 3.27.	Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	78
Tabel 3.28.	Hasil penilaian evaluasi kinerja	79
Tabel 3.29.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	80
Tabel 3.30.	Perkembangan PAD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.tahun 2011 – 2024	82
Tabel 3.31.	Program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	83
Tabel 3.32.	Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 sebelum dan setelah perubahan	84
Tabel 3.33.	Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	87



Tabel 3.34. Realisasi Kuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan (TP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	89
Tabel 3.35. Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.....	9
Gambar 3.1.	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) per Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024	56
Gambar 3.2.	Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024	59
Gambar 3.3.	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024 per Kabupaten /Kota Provinsi Kepulauan Riau	60



BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam Pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agarmampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yangdinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LKjIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dandituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Untuk dapat menghasilkan *outcome* kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.



Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau benar-benar dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam 1 tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya sehingga Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mampu eksis dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya memiliki dua fungsi utama sekaligus, pertama merupakan sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan masyarakat) serta kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi



Kepulauan Riau.

Selanjutnya maksud dan tujuan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) :

- a) **Aspek Akuntabilitas Kinerja** : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024.
- b) **Aspek Manajemen Kinerja** : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau bagi upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
15. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);



21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

1.4. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman



Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

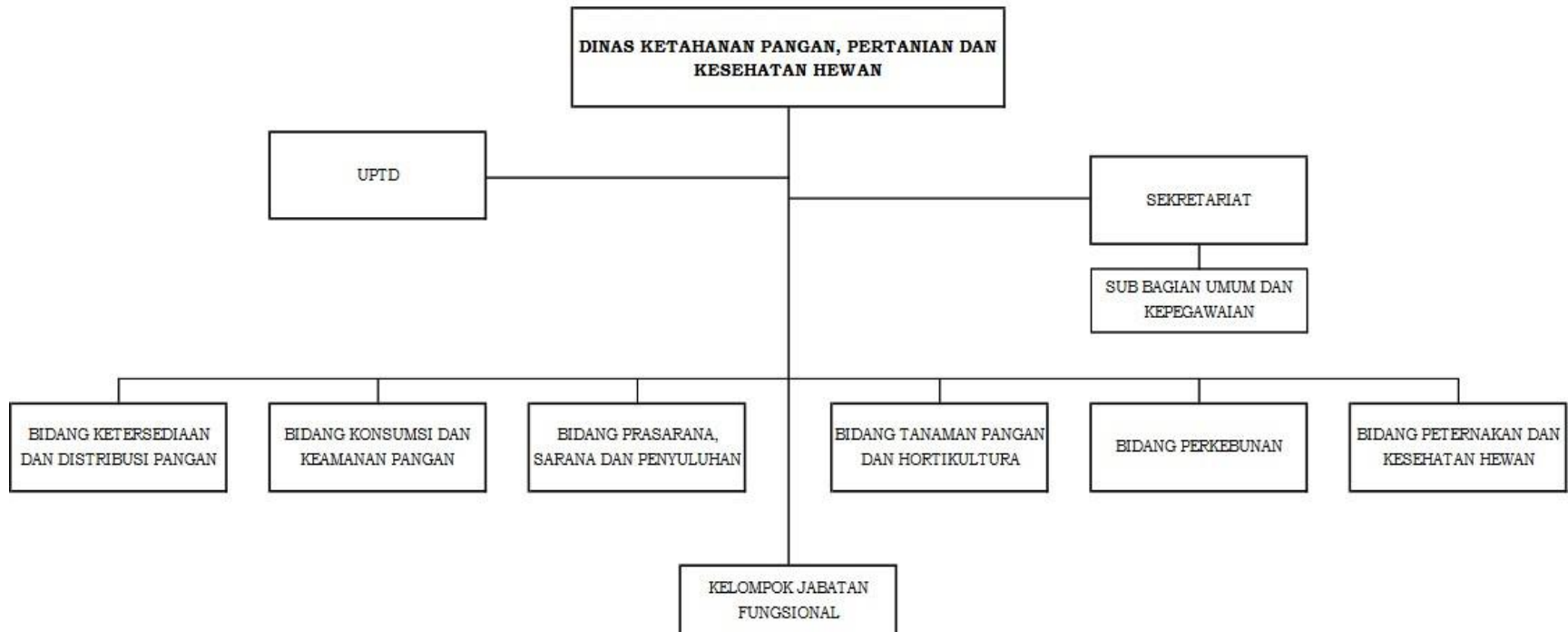
1. Sekretariat;
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Bidang Perkebunan;
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan
8. UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
9. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN
HEWAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023





1.5. SUMBER DAYA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau per Desember 2024 berjumlah 150 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 72 orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 33 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 41 orang.

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai tingkat pendidikan terendah (SMA) hingga tertinggi (S3).

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	S 3	-	1	1
2	S 2	4	2	6
3	S 1	25	27	52
4	D 4	1	-	1
5	D 3	2	7	9
6	D 2	-	-	-
7	D 1	-	-	-
8	SMA	2	-	2
9	SMP	-	-	-
10	SD	-	-	-
Jumlah Total :		34	37	71

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan II sampai dengan Golongan IV seperti disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya(IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
4	Pembina Tk. I (IV/b)	3	1	4
5	Pembina (IV/a)	6	4	10
6	Penata Tk. I (III/d)	17	13	31
7	Penata (III/c)	4	5	9
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	9	11
9	Penata Muda (III/a)	2	3	5
10	Pengatur Tk. I (II/d)	2	-	2
11	Pengatur (II/c)	-	-	-
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
13	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
14	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
15	Juru (I/c)	-	-	-
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
17	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah Total :		31	40	71

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

B. SARANA DAN PRASARANA

Berikut ini adalah aset yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penunjang operasional kedinasan.



Tabel 1.3. Aset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

No	Nama Barang	Nilai
1	TANAH	
	Tanah	2.774.880.000,00
	Jumlah	2.774.880.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	
	Alat-alat Besar	4,704,550,440.00
	Alat-alat Angkutan	4,955,270,075.72
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	815,826,800.00
	Alat-alat Pertanian / Peternakan	4,750,254,612.00
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4,936,831,162.40
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	825,092,550.00
	Alat-alat Kedokteran	639,045,000.00
	Alat-alat Laboratorium	10,915,049,155.00
	Alat-alat Keamanan	233,207,270.00
	Alat-alat Persenjataaan	2,428,458,616.10
	Komputer	4,955,270,075.72
		285,450,500.00
		8,300,000.00
	Jumlah	35,497,336,181.22
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	Bangunan Gedung	35,052,323,814.51
	Bangunan Monumen	131,488,500.00
	Jumlah	35,183,812,314.51
4	JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN	
	Jalan dan Jembatan	16,666,081,814.36
	Bangunan Air / Irigasi	3,636,281,470.00
	Instalasi	4,467,816,150.00
	Jaringan	426,752,000.00
	Jumlah	25,196,931,434.36
5	ASET TETAP LAINNYA	
	Buku Perpustakaan	9,281,250.00
	Hewan	815,063,000.00
	Biota Perairan	-
	Tanaman	118,779,325.00
	Jumlah	943,123,575.00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
		184.467.000,00
	Jumlah	184.467.000,00
7	ASET LAINNYA	
	a.Aset Tak Berwujud	34,650,000.00
	b. Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-
	d. Aset Lainnya	2,224,178,000.00
	Jumlah	2,258,828,000.00
8	EXTRACOMPTABLE	
	Peralatan dan Mesin	911.592.585,00
	Jumlah	911.592.585,00
JUMLAH		102,039,378,505.09



1.6. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.4. Permasalahan Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketahanan pangan yang masih kurang	<ol style="list-style-type: none">1) Belum optimalnya perwujudan swasembada pangan daerah.2) Peringkat Provinsi Kepulauan Riau pada Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2019 berada di posisi 28 dari 32 provinsi.3) Adanya potensi pengembangan tanaman pangan namun masih terbatas.4) Perlunya peningkatan Produk Pangan Asal Hewan yang	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen dan dukungan pemerintah kab/kota dalam penyediaan peningkatan ketersediaan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan kurang.• Keterbatasan armada angkutan barang dan pelabuhan untuk penyediaan pangan di pulau-pulau.• Budaya pola konsumsi



		Aman dan Sehat.	
		5) Masih adanya daerah rawan pangan	pangan yang kurang beragam, bergizi dan berimbang.
		6) Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara merata.	• Kurangnya pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan
2.	Produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan yang kurang, dan penyakit hewan	<div>1) Diperlukan peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.</div> <div>2) Diperlukan pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.</div> <div>3) Diperlukan peningkatan kapasitas petani dan pelaku perkebunan.</div> <div>4) Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.</div> <div>5) Belum optimalnya keberlanjutan produksi pertanian.</div> <div>6) Belum optimalnya penyuluh yang meningkat kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya</div> <div>7) Diperlukan diversifikasi komoditas dan produk pertanian untuk pasar domestik dan ekspor.</div> <div>8) Belum optimalnya pengendalian penyakit hewan</div>	<div>• Kurangnya sarana produksi pertanian</div> <div>• Kurangnya sumber benih dan kuantitas SDM balai benih.</div> <div>• Kelembagaan petani yang masih lemah akibat kompetensi petani masih rendah,</div> <div>• Keaktifan kelompok petani dalam menerima penyuluhan yang kurang</div> <div>• Jumlah penyuluh dan balai penyuluh pertanian yang kurang.</div> <div>• Ketersediaan obat-obatan hewan yang kurang</div> <div>• Kurangnya pencegahan, pengendalian, dan advokasi KIE mengenai kesehatan hewan.</div> <div>• Pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi yang masih kurang karena masih bertumpu pada anggaran dari pemerintah provinsi.</div> <div>• Kesadaran pelaku usaha peternakan dalam pemenuhan standar usaha peternakan masih kurang</div> <div>• Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan dan bahan uji pusat kesehatan hewan</div> <div>• Kesadaran peternak masih kurang sehingga pembedahan sapi betina produktif banyak terjadi</div>



1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN AKUTANBILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

Sistematika penyajian laporan Akutanbilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output* dan sebagian *outcome*.

Laporan Akutanbilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya capaian kinerja (*performance results*) kegiatan-kegiatan tahun 2024 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun



kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sejak 2021-2026, yang disusun mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut mengandung telaahan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJMD, RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 memiliki fungsi yang sangat strategis karena akan menjadi acuan bagi bidang-bidang untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan juga akan menjadi pedoman dalam evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan.



2.1.1. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

A. ISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAUPERIODE 2021-2026

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah: ***"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu***

yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim".

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat



Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepri; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepri (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan.



B. MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PERIODE 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim", misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung bunda Melayu
2. Meningkatkan daya saing ekonomi pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.



9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran darivisi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, maka dari 9 misi pembangunan jangka menengah Kepulauan Riau, terdapat 1 (satu) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada Misi 5 :

Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.



Adapun strategi dan Kebijakan yang dilakukan untuk pencapaian misi ini, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian misi ke – 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021- 2026.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak secara berkelanjutan	Peningkatan pelatihan pelaku agribisnis dan kelompok tani, penerapan teknologi pertanian tepat guna, fasilitasi sarana produksi dan alsintan, dan Peningkatan pembibitan dan pengembangan usaha peternakan, dan pengawasan kesehatan hewan dan penanganan penyakit ternak
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/ kota	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.	Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.



2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada :
“Peningkatan Pelayanan Dasar, Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Keterhubungan Antar Daerah (*Conectivity*), Pengembangan Sektor Maritim dan Pariwisata, Peningkatan Ekonomi Produktif, Pengentasan Kemiskinan serta Tatakelola Pemerintahan”.

Sedangkan Prioritas pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, mengacu pada Pembangunan daerah pada Tahun 2024, yaitu :

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, serta Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor Pertanian, dan peningkatan kinerja sektor Pangan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selama kurunwaktu 2021 – 2026. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :





Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan & perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku.	Milyar Rp.	3989,22	3996,25	4003,45	4010,84	4010,84
Meningkatnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)	Persentase Peningkatan Produktivitas pertanian	PERSEN	1,76	1,77	1,78	1,79	1,79
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	PERSEN	2,35	1,30	1,35	1,40	1,40
	Nilai tukar petani (NTP).	RASIO	103,34	99,95	99,98	99,99	99,99
	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit.	PERSEN	64,75	64	65	66	66
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	Indeks	63,26	63,27	63,28	63,29	63,29
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Skor PPH Konsumsi	PERSEN	89	89,30	89,70	90,10	90,10
	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan.	PERSEN	124	115	115,5	116	116
	Persentase daerah rentan terhadap kerawanan pangan.	PERSEN	6,60	≤10	≤10	≤10	≤10
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP.	Predikat	89,25	75	76	76	76
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Predikat	89,25	75	76	76	76





2.3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas ketahanan pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2021–2026 yang dilaksanakan melalui 5 misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan & perkebunan)	Meningkatnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan • Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan • Peningkatan SDM petani melalui pelatihan dan penyuluhan • Pengembangan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan • Peningkatan posisi tawar petani melalui kemitraan • Pengembangan integrated farming • Pemetaan kluster daerah pertanian daerah secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah • Bantuan akses permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian • Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah • Peningkatan implementasi pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian • Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian • Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman • Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan • Peningkatan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan membentuk petani milenial • Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan • Peningkatan pengembangan kluster pertanian berdasarkan wilayah dan pertanian terintegrasi guna mendukung pariwisata berbasis industri pertanian



Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pertanian dan teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pertanian untuk mendukung pengembangan agrowisata • Optimalisasi produksi dan efisiensi peternakan untuk dihasilkan produk asal ternak yang cukup dan efisien. • Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Peternakan dan penumbuhan minat beternak, IPTEK dan penumbuhan wirausaha peternakan milenial. • Peningkatan Ketersediaan dan kecukupan bibit unggul, pejantan unggul serta sperma berkualitas tinggi dalam mendukung kesuksesan IB. • Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu (KPT) yang profesional berbasis ekonomi lokal sebagai buffer wilayah. • Penyediaan pakan terpadu (legum, konsentrat) dan pembangunan kebun leguminosa, dan pembangunan industri pakan ternak • Peningkatan Manajemen Budidaya dan pemberian pakan yang intensif melalui pembuatan pakan penguat/konsentrat yang berkualitas dan murah. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran produk pangan asal hewan • Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi • Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan • Peningkatan penjaminan pangan asal hewan, kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah Provinsi
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi • Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan



Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi • Penanganan daerah rentan kerawanan pangan • Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota • Peningkatan promosi panganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan pangan pertanian dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.



B. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan dan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 antara lain :

- 1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - c. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
- 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
 - a. Penataan Prasarana Pertanian
- 3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**



- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
- c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
- d. Kesejahteraan Hewan

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

6. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
- c. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

7. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

8. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN



- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian



dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 9 Indikator adalah :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan)		Kontibusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Milyar (Rp)	PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Meningkatnya produktifitas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan)	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	%	Jumlah Produktifitas Tanaman Pangan tahun berjalan dikurangi jumlah produktifitas tahun lalu dibagi jumlah produktifitas tahun yang lalu kali 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura	%	Jumlah Produktifitas Tanaman Hortikultura tahun berjalan dikurangi jumlah produktifitas tahun lalu dibagi jumlah produktifitas tahun yang lalu kali 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	%	Jumlah Produktifitas Tanaman Perkebunan tahun berjalan dikurangi jumlah produktifitas tahun lalu dibagi jumlah produktifitas tahun yang lalu kali 100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Perkebunan
		Persentase Peningkatan Produksi Ternak	%	Penambahan Populasi dibagi jumlah populasi kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Peternakan
		Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	Jumlah Sarana Produksi pertanian tahun sekarang dikurangi jumlah sarana produksi pertanian tahun sebelumnya dibagi sarana produksi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan dan UPT BBI



				pertanian tahun sebelumnya di kali 100		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%	Perbandingan Indeks harga yang petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani	BPS Provinsi	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
		Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah penyuluh pertanian dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
		Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	Jumlah Hewan Sembuh dibagi Jumlah Hewan yang diobati dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	Jumlah Sampel Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat dibagi Jumlah sampel Uji di kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	UPT Keswan
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	Jumlah Areal yang dikendalikan dibagi luas areal serangan kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	Jumlah Areal yang dikendalikan dibagi luas areal serangan kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	Jumlah Areal yang dikendalikan dibagi luas areal serangan kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah di standarisasi dengan bobot indikator	Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	AKE Tingkat Ketersediaan terhadap AKE Tingkat Konsumsi dibagi AKE Tingkat Konsumsi dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Persentase Maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	Standar Deviasi komoditas beras nilai rata-rata harga beras di kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Skor PPH Konsumsi	%	Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + skor PPH kelompok lain-lain	Badan Pangan Nasional	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	Jumlah Daerah Rentan terhadap kerawanan pangan di bagi jumlah kecamatan se-Kepri di kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	Sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sample yang diambil dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Bidang Konsumsi dan keamanan pangan
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		Nilai SAKIP	Predikat	Nilai hasil Evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP	Predikat	Nilai hasil Evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



2.5. PERJANJIAN KINERJA

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan *reward* and *punishment*.



Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program		Anggaran	
1	2	3	4	5		6	
1	Meningkatnya Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	3996,25	1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	6.220.511.000
				2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	3.810.162.335,5
				3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	68.044.710
				4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	132.228.531
				5.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.207.128.050
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang dan aman	Indeks Ketahanan Pangan	63,27	1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	1.803.507.070,1
				2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	133.571.210
				3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	47.169.787
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP	75	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	22.781.760.992,4



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, sebagaimana pada berikut :

Tabel 2.6. Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2024

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.803.507.070,1	APBD-P
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	133.571.210	APBD-P
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	47.169.787	APBD-P
4	Program Penyuluhan Pertanian	1.207.128.050	APBD-P
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.810.162.335,5	APBD-P
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.220.511.000	APBD-P
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner	68.044.710	APBD-P
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132.228.531	APBD-P
9	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (BKP)	2,797,533,000	Dekonsentrasi
10	Program Dukungan Manajemen (BKP)	186.680.000	Dekonsentrasi
11	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Hortrikultura)	29.928.000	Dekonsentrasi
12	Program Dukungan Manajemen (Hortrikultura)	205,208,000	Dekonsentrasi
13	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Perkebunan)	54.400.000	Dekonsentrasi
14	Program Dukungan Manajemen (Perkebunan)	342.020.000	Dekonsentrasi
15	Program Dukungan dan Manajemen (PSP)	75.000.000	Dekonsentrasi
16	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Tanaman Pangan)	108,000,000	Dekonsentrasi
17	Program Dukungan Manajemen (Tanaman Pangan)	47.400.000	Dekonsentrasi



18	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Penyuluhan Pertanian)	383,506,000	Dekonsentrasi
19	Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri (Perkebunan)	543,781,468	Tugas Pembantuan
20	Program Dukungan Manajemen(Perkebunan)	107.980.000	Tugas Pembantuan
21	Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri(Kesehatan Hewan)	80.000.000	Tugas Pembantuan
22	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas(Kesehatan Hewan)	134,520,000	Tugas Pembantuan
23	Program Dukungan Manajemen (Kesehatan Hewan)	79,522,000	Tugas Pembantuan



BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengemban amanah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-performance* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja



dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja.

Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja.

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :



Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Kurang
2	75% sampai 100%	Cukup
3	55% sampai 75%	Baik
4	Kurang dari 55%	Sangat Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

❖ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

❖ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sampai sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat. Oleh karenaitu, dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator kinerja, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelakuterhadap capaian indikator kinerja tersebut. Sehingga gambaranpencapaian indikator kinerja merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan Program dan Kegiatan diukur berdasarkan pencapaian *outcome*. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat *outcome* merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Pengukuran capaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian



dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan SIPP yang dilaksanakan secara bulanan.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dihitung dengan cara membandingkan target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berikut sasaran dan Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Persentase Capaian Kinerja	Status Capaian
			Target	Capaian Kinerja		
1	2	3	5		6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	63,27	66,29	104,7	Sangat Baik

Tabel 3.2. Perbandingan Indikator Ketahanan (IKP) Pangan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	66,29	63,29	104,74

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, capaian Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 66,29 Indeks di bandingkan target Tahun 2023 sebesar 63,27 Indeks atau mencapai 104,7% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Sedangkan jika di bandingkan dengan target akhir RPJM/Renstra 2026 telah tercapai dengan capaian 104,74%. Jika di bandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, IKP Provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 86,99% dari Capaian IKP Nasional

Tabel 3.3. Perbandingan Indikator Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	IKP Nasional	%
1.	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	66,29	76,20	86,99



Tabel 3.4. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Persentase Capaian	Status Capaian
			Target	Capaian Kinerja	Kinerja	
1	2	3	5		6	7
1	Meningkatnya Produktifitas Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp.)	3.996,22	4.276,26	107,01	Sangat Baik

Tabel 3.5. Perbandingan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp.) Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp.)	4.276,26	4010,84	106,62

Menurut analisa Tabel 3.5 diatas tercapainya target Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Harga Berlaku cenderung meningkat, dan telah melampaui target pada akhir RPJMD/Renstra Tahun 2026.



B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan, berikut disampaikan analisis capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

URUSAN PERTANIAN

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor



ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis yang dikembangkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian Komoditi/Produk/Jenis Unggulan (KPJu) di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh KPJu di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- Sub sektor Tanaman Pangan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.
- Sub sektor Hortikultura adalah cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, bayam, kangkung, terong, durian, pisang, nenas, pepaya, manga, manggis
- Sub sektor perkebunan adalah karet, kelapa, sagu, cengkeh, lada, gambir.
- Sub sektor peternakan adalah sapi, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik dan kambing

Sektor pertanian sebagai tugas pokok dan fungsi utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya guna mendukung pengembangan dan pembangunan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya petani dan peternak. Maka dari itu konsentrasi pembangunan pertanian dapat digambarkan dan dijelaskan melalui sasaran meningkatnya hasil



produksi pertanian yang bertujuan utama untuk peningkatan produksi pertanian di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk variabel yang terukur dalam pengembangan pertanian. Berikut ini beberapa indikator yang mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mencapai sasaran strategis ke satu yaitu Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp.) dengan capaian Rp 3.996,25 Milyar hal ini atas capaian peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, adapun target produktivitas yang harus dicapai yaitu :

1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, ditetapkan sebesar 1,49%;
2. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura, ditetapkan sebesar 0,80%;
3. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan, ditetapkan sebesar 3,20%;
4. Persentase Peningkatan Produktivitas Produksi Ternak, ditetapkan sebesar 1,30%;

1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)

Pengertian Produksi dalam pertanian adalah hasil dari keseluruhan atau jumlah total lahan pertanian yang dipanen di suatu daerah.

Tanaman pangan berupa padi, ubi jalar dan ubi kayu merupakan sektor unggulan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahunnya baik di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat kegiatan optimasi tanaman padi dan ubi kayu selalu menjadi prioritas yaitu pengembangan tanaman padi, pengembangan benih padi unggul, pengembangan ubi kayu. Diharapkan dengan peningkatan produksi padi,



ubi jalar dan ubi kayu dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk menuju ke swasembada pangan, sehingga pasokan bahan pangan di Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi bergantung pada daerah lain dan bisa meminimalisir panjangnya rantai distribusi pangan yang pada akhirnya menurunkan harga bahan pangan.

Adapun rumus perhitungan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan adalah :

RUMUS : [(Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan tahun berjalan - jumlah produktivitas tahun lalu) dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu] X 100%

Produktivitas adalah produksi dibagi luas panen sehingga produktivitas tanaman pangan tahun 2023 sebesar 18,37 ton/ha dan produktivitas tahun 2024 sebesar 22,37 ton/ha. Hal ini terjadi peningkatan produktivitas tanaman pangan sebesar 4,00 ton/ha dibanding dengan tahun 2023, sehingga capaian persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan tahun 2024 sebesar 21,75 % dari target sebesar 1,49% maka angka realisasi capaian 1.459,73 %. Angka tersebut menunjukkan capaian **“Sangat baik”**.

Tabel. 3.6. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% capaian kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	1,49	21,75	1.459,73

Sumber : Produktivitas Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan

Keterangan :

**) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas, indikator sasaran yang ditetapkan mencapai target yang telah ditetapkan kategori **“Sangat Baik”** dengan tingkat pencapaian 1.459,73%.



Berikut tabel perkembangan produktivitas tanaman pangan tahun 2022 dan 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.7. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)

No.	Komoditas	Produktivitas (Ton/Ha)			Persentase Peningkatan
		2022	2023	2024*	Produktivitas Tanaman Pangan (%)
1	Padi	2,82	2,81	2,69	
2	Jagung		4,75	3,85	
3	Kacang Tanah		1,10	1,10	
4	Ubi Kayu	32,03	27,67	32,50	
5	Ubi Jalar	14,66	11,23	13,93	
Rata-rata					
Produktifitas		16,51	18,37	22,37	21,75

Sumber : Produktivitas Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Untuk melihat tingkat perkembangan Jumlah Produksi tanaman pangan yaitu padi, ubi kayu dan ubi jalar sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Perkembangan Produktifitas Padi, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (ton/ha) 2021-2024

NO	KOMODITAS	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024*
1	Padi	3,17	2,82	2,81	2,69
2	Jagung			4,75	3,85
3	Kacang Tanah			1,10	1,10
4	Ubi Kayu	32,95	32,03	27,67	32,50
5	Ubi Jalar	15,67	14,66	11,23	13,93

Sumber : Produktivitas Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Bila di review dari data Perkembangan Jumlah Produktifitas Padi (kwintal/ha) 2021-2024, dapat dilihat pada tahun 2021-2024 produktifitas padi berfluktuasi, capaian produksi tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 3,17 ton/ha karena adanya bantuan benih padi dan pupuk untuk optimalisasi produksi padi serta dukungan alat mesin pertanian. Jika di lihat kenaikan produktifitas padi dari tahun 2021 ke 2024 karena adanya bantuan benih padi melalui kegiatan Desa Mandiri dan P3BTP.



Tabel 3.9. Sebaran Jumlah Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024*
1	Karimun	80,94	0,00	3,01	0.00
2	Bintan	43,40	25,36	11,42	47.93
3	Natuna	299,02	287,30	186,78	194.39
4	Lingga	282,12	118,12	166,78	73.69
5	Kep. Anambas	149,53	76,13	55,12	19.01
6	Batam	-	-	-	-
7	Tanjungpinang	-	-	-	-
Jumlah		855,01	506,91	423,11	335.02

Sumber :BPS, diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

*Data Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Dari Tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa produksi padi di Kabupaten Bintan dan Natuna Kabupaten Karimun, Lingga dan Kep Anambas mengalami penurunan produksi karena kena serangan bercak daun dan bencana alam yaitu banjir di sebagian lahan sawah.

Walaupun produksi padi mengalami penurunan, tetapi terjadi peningkatan produktifitas, disebabkan luas panen yang menurun.

Tabel 3.10. Sebaran Jumlah Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Produktivitas (ton/ha)			
		2021	2022	2023	2024*
1	Karimun	3,49	-	2,14	-
2	Bintan	3,46	2,83	2,13	3,05
3	Natuna	2,73	2,92	2,99	3,28
4	Lingga	3,29	2,63	3,35	3,36
5	Kep. Anambas	3,79	2,79	2,69	1,61
6	Batam	-	-	-	-
7	Tanjungpinang	-	-	-	-
Jumlah		3,17	2,82	2,81	2,69

Sumber :BPS, diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

*Data Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau



Untuk perkembangan produktifitas ubi kayu dari tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 4,83 ton/ha dibanding tahun 2023. Sedangkan perkembangan produksi ubi jalar dari tahun 2023 dengan tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 2,71 ton/ha dibanding tahun 2023. Untuk ubi kayu dan ubi jalar bisa sebagai pangan alternatif dan sebagai pangan lokal di Provinsi Kepulauan Riau karena dua komoditi sangat cocok di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura (%)

Hortikultura (*horticulture*) berasal dari bahasa Latin *hortus* (tanaman kebun) dan *cultura/colere* (budidaya), dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas bukan hanya untuk budidaya di kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengolahan, pengemasan dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern.

Tanaman Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian. Namun metode ini hanya memfokuskan pada budidaya tanaman seperti tanaman sayuran (*olerikultura*), tanaman buah- buahan (*pormologi/frutikultur*), tanaman bunga (*florikultura*) dan tanaman obat-obatan (*biofarmaka*).

Namun Komoditas Hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Sayuran yang terdiri dari Kangkung, Bayam, Kacang Panjang, Ketimun, Petai, Petsai/Sawi, Terung, Cabai Besar dan Cabai Rawit, Bawang Merah.
2. Buah-buahan yang terdiri dari Semangka, Durian, Nenas, Pisang dan Pepaya.



Komoditas Hortikultura merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahunnya baik di kabupaten, provinsi maupun pusat kegiatan optimasi dan perluasan tanaman Komoditas Hortikultura diharapkan mengalami peningkatan, sehingga pasokan bahan pangan Komoditas Hortikultura di provinsi Kepulauan Riau dapat tercukupi serta dapat digunakan sebagai substitusi bahan pangan pokok lainnya.

Adapun rumus perhitungan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura adalah

RUMUS : [(Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura tahun berjalan - jumlah produktivitas tahun lalu) dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu] X 100%

Komoditas yang digunakan untuk mengukur peningkatan produktivitas hortikultura adalah sayuran dan buah semusim karena setiap saat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun produktivitas adalah produksi dibagi luas panen sehingga produktivitas tanaman hortikultura tahun 2023 sebesar 7,33 ton/ha dan produktivitas tahun 2024 sebesar 9,40 ton/ha. Hal ini terjadi peningkatan produktivitas tanaman hortikultura sebesar 2,07 ton/ha dibanding dengan tahun 2023, sehingga capaian persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura tahun 2024 sebesar 28,29% dari target sebesar 0,80% maka angka realisasi capaian 3.536,25%. Angka tersebut menunjukkan capaian **“Sangat baik”**.

Tabel. 3.11. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% capaian kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)	0,80	28,29	3.536,25

Sumber : Produktivitas Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan

Keterangan : *) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Produksi Hortikultura selama tahun 2024. Produksi Hortikultura tahun 2024 sebesar 27.788,8 ton Angka tersebut menunjukkan capaian **“Sangat Baik”**.

Tabel. 3.12. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)

NO	KOMODITAS	Produktivitas (ton/Ha)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)
		2023	2024*	
1	2	3	4	5
1	Bawang Daun	3,60	9,61	
2	Bawang Merah	2,88	12,28	
3	Bayam	6,46	6,93	
4	Buncis	7,46	14,50	
5	Cabai Besar (Group)	10,05	14,63	
6	Cabai Rawit	5,13	7,39	
7	Kacang Panjang	9,92	13,08	
8	Kangkung	6,92	8,04	
9	Labu Siam	0,20	0,20	
10	Mentimun	9,37	12,46	
11	Petsai/Sawi	5,58	6,42	
12	Semangka	6,89	10,24	
13	Terung	7,47	12,22	
14	Tomat	7,75	11,08	
Rata-rata Produktifitas		7,33	9,40	28,29

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Produksi Komoditas Hortikultura Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tabel 3. 10 dibawah ini.



Tabel 3.13. Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	
		2023	2024*
1	Karimun	1.400,20	695,9
2	Bintan	7.814,40	12.813,10
3	Natuna	527,7	365,1
4	Lingga	874,2	1.662,70
5	Kep. Anambas	91,7	82,8
6	Batam	11.423,20	11.907,70
7	Tanjungpinang	218,4	261,5
Jumlah		24.466,8	27.788,80

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Produksi Komoditas Hortikultura tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan sebesar 12.813,10 ton, disusul Kota Batam sebesar 11.907,70 ton, Kabupaten Lingga 1.662,70 ton, Kabupaten Karimun 695,9 ton, Kota Tanjungpinang 261,5 ton, Kabupaten Natuna 365,1 ton, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 82,8 ton.

Dari data diatas, terdapat fluktuasi produksi Hortikultura diharapkan, ada yang meningkat dan ada juga menurun. Penurunan produksi terjadi di Kab. Karimun, Kab. Natuna, dan Kab. Kepu. Anambas. Disamping itu mengingat komoditas hasil hortikultura mudah rusak dan tidak tahan lama, sehingga diperlukan pengelolaan pasca panen yang lebih baik, sehingga produksi yang dihasilkan dapat tetap terjaga mutunya.



Gambar 3.1. Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) per Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024



3) Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan (Ton)

Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat merupakan definisi perkebunan. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang



ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Perkebunan dibedakan dari *agroforestri* dan *silvikultur* (budidaya hutan) karena sifat intensifnya. Dalam perkebunan pemeliharaan memegang peranan penting; sementara dalam *agroforestri* dan *silvikultur*, tanaman cenderung dibiarkan untuk tumbuh sesuai kondisi alam. Karena sifatnya intensif, perkebunan hampir selalu menerapkan cara budidaya monokultur, kecuali untuk komoditas tertentu, seperti lada dan vanili. Penciri sekunder, yang tidak selalu berlaku, adalah adanya instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap hasil panen dari lahan perkebunan itu, sebelum produknya dipasarkan. Perkebunan dibedakan dari usaha tani pekarangan terutama karena skala usaha dan pasar produknya.

Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Namun, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Kepemilikan lahan bukan merupakan syarat mutlak dalam perkebunan, sehingga untuk beberapa komoditas berkembang sistem sewa-menyewa lahan atau sistem pembagian usaha, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Sektor perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adapun rumus perhitungan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan adalah

RUMUS : [(Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan tahun berjalan - jumlah produktivitas tahun lalu) dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu] X 100%

Komoditas yang digunakan untuk mengukur peningkatan



produktivitas perkebunan adalah semua komoditi perkebunan yang dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat. Adapun produktivitas adalah produksi dibagi luas panen sehingga produktivitas tanaman perkebunan tahun 2022 sebesar 345,84 kg/ha dan produktiivtas tahun 2023 sebesar 355,84 kg/ha. Hal ini terjadi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 10 kg/ha dibanding dengan tahun 2022, sehingga capaian persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan tahun 2023 sebesar 2,89% dari target sebesar 3% maka angka realisasi capaian 96,33 %. Angka tersebut menunjukkan capaian “**Sangat baik**”.

Tabel. 3.14. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman perkebunan (%)

NO	KOMODITAS	Produktifitas (Kg/Ha)		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)
		2023	2024	
1	KARET	245,24	247,94	
2	KELAPA DALAM	371,55	388,94	
3	KELAPA HIBRIDA	736,84	1.526,32	
4	CENGKEH	161,13	163,07	
5	LADA	240,24	243,80	
6	SAGU	255,05	274,37	
7	KELAPA SAWIT	1.089,11	1.132,14	
8	KOPI	21,04	40,04	
9	KAKAO	328,85	336,54	
10	PINANG	78,85	88,06	
11	GAMBIR	776,56	814,72	
12	PALA	9,30	9,69	
Rata-Rata Produktivitas		286,62	295,92	3,24

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Bila dilihat dari data sebaran Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat produksi tanaman perkebunan sebagai berikut :



Tabel 3.15. Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2024

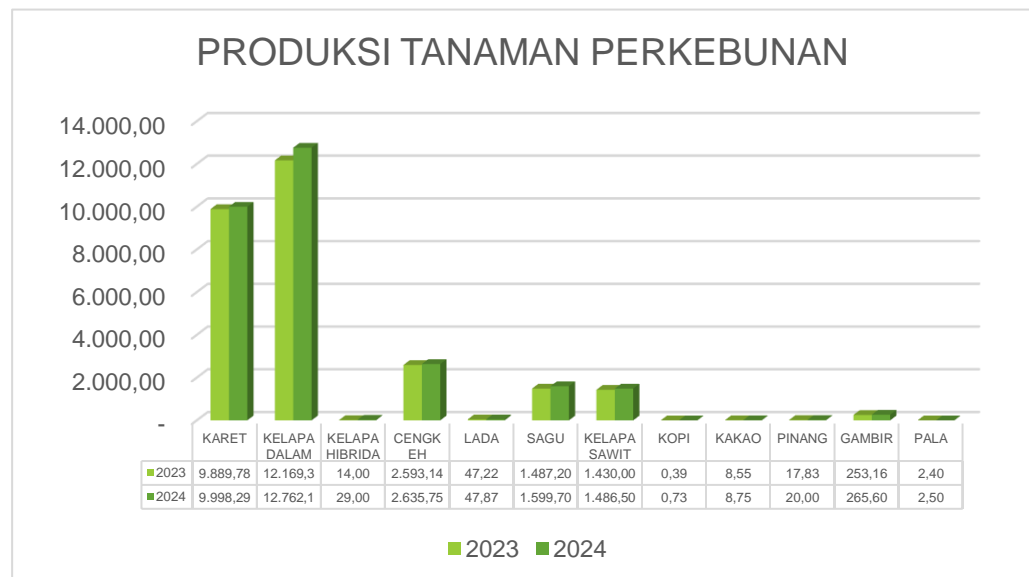
NO	KOMODITAS	Produksi (Ton)	
		2023	2024*
1	KARET	9.889,78	9.998,29
2	KELAPA DALAM	12.169,30	12.762,11
3	KELAPA HIBRIDA	14,00	29,00
4	CENGKEH	2.593,14	2.635,75
5	LADA	47,22	47,87
6	SAGU	1.487,20	1.599,70
7	KELAPA SAWIT	1.430,00	1.486,50
8	KOPI	0,39	0,73
9	KAKAO	8,55	8,75
10	PINANG	17,83	20,00
11	GAMBIR	253,16	265,60
12	PALA	2,40	2,50
Jumlah		27,898.971	28,063.76

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Dari tabel 3.14 diatas dapat kita lihat bahwa Sementara ada Komoditas yang mengalami peningkatan Produksi yaitu Karet, Sagu dan Kopi.



Grafik 3.2. Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) Tahun 2023-2024



Bila dilihat dari data sebaran Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat produksi tanaman perkebunan sebagai berikut :

Tabel 3.16. Produksi Tanaman Perkebunan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)
1	Karimun	3.567,33
2	Bintan	5.250,54
3	Natuna	10.459,02
4	Lingga	6.915,62
5	Kep. Anmbas	1.922,38
6	Batam	697,62
7	Tanjungpinang	44,29
Total		28.856,80

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Keterangan :

*) = Merupakan Angka Sementara 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan tabel 3.15 di atas Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024 paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 10,164.10 ton dan yang paling rendah adalah Kota Tanjungpinang yaitu 43.00 ton.



Gambar 3.3. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2024 per Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau



4) Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (%)

Angka Persentase Peningkatan Populasi Ternak merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak selama tahun 2024 dalam satuan persen. Jumlah populasi ternak pada tahun 2023 adalah 19,407,348 ekor, sedangkan pada tahun 2024 adalah 19,997,686 ekor sehingga ada penambahan populasi ternak sebanyak 590,338 ekor. Sedangkan khusus untuk produksi ternak sapi di tahun 2024 sebanyak 15,775 ekor sedangkan tahun 2023 sebanyak 15,159 ekor sehingga ada penambahan populasi ternak sapi sebanyak 616 ekor yang merupakan penambahan dari hasil inseminasi buatan.

Dalam penghitungan pencapaian indikator persentase peningkatan produktivitas ternak sapi karena penambahan populasi melalui Inseminasi Buatan sehingga perlu pengawasan dan pembinaan dari medis dan para medis untuk menentukan ternak sapi dilakukan inseminasi buatan guna menambah populasi ternak sapi yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Adapun rumus untuk penghitungan persentase peningkatan produktivitas ternak sebagai berikut :

RUMUS : [(Jumlah Produktivitas Ternak tahun berjalan - jumlah produktivitas tahun lalu) dibagi jumlah produktivitas tahun yang lalu] X 100%

Bila direview dari angka target yang ditetapkan angka sementara kenaikan persentase produktifitas ternak pada tahun 2024 sebesar 1,30 sedangkan angka realisasi capaian 2,44 %, sehingga angka realisasi capaian mencapai 187.69 % dengan katagori kinerja “Sangat Baik”



Tabel 3.17. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (%)	1,30	2,44	187.69 %

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepulauan Riau

*) = Merupakan Angka Sementara 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Fluktuasi Peningkatan Populasi Ternak selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18. Perkembangan Populasi Ternak tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024*
Peningkatan Populasi Ternak	23.422.539	19.311.843	21.097.292	19.407.348	19,997,686

Sumber data : BPS, diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepulauan Riau

*)Data Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan

Tabel 3.19. Populasi Ternak di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No	Hewan Ternak	Populasi Ternak (Ekor)		Persentase Kenaikan Populasi Ternak (%)
		2023	2024*)	
1	Sapi potong	15.159	15.775	4,06
2	Sapi Perah	-	3	100,00
3	Kerbau	24	24	0
4	Kambing	20.793	21.904	5,34
5	Domba	99	112	13,13
6	Babi	33.235	36.803	10,74
7	Kuda	2	2	0
8	Ayam Buras	505.195	581.693	15,14
9	Ayam Ras Petelur	1.224.154	1.317.687	7,64
10	Ayam ras Pedaging	17.545.479	17.945.495	2,28
11	Itik	15.415	19.216	24,66
12	Kelinci	173	173	0
13	Puyuh	37.945	47.915	26,27
14	Itik Manila	9.675	10.884	12,50
Jumlah		19.407.348	19.997.686	3,04

Sumber data : *) Statistik Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, diolah Dinas KetahananPangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepulauan Riau

*Data Sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau



Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Target Indikator Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	21,75	3,66	594,26
2.	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (%)	28,29	1,26	2.245,24
3.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (%)	3,24	3,80	85,26
4.	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%)	2,44	1.4	174,29

Berdasarkan Tabel 3.20. capaian indikator Tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD/Renstra 2026, kecuali Persentase Peningkatan Produksi Ternak yang baru mencapai 85,26. Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang pertanian diantaranya pemberian bantuan alat pertanian, penggunaan bibit unggul, bantuan pupuk, kemudahan akses terhadap pupuk subsidi, pelatihan peningkatan pengetahuan petani, serta peningkatan peran penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan kepada para petani.



URUSAN PERTANIAN

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Strategis 1 adalah

Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian

Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Sasaran Strategis I sebesar Rp. 14.617.047.765,50 dengan realisasi sebesar Rp. 5.701.403.957,00 atau sebesar 39,01% Rendahnya Realisasi pada Sasaran Strategis I ini, disebabkan oleh adanya tunda bayar sebesar Rp. 6.614.010.619,00. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan** yang konsisten melalui perbandingan Rata-rata Persentase Capaian sasaran Strategis dengan persentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Porgram	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp.)	3.996.25	4.276,26	107,01	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 7.161.044.012,00	2.001.882.170,00	41,00
						2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 7.134.223.785,50	3.638.866.702,00	51,01
						3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 321.779.968,00	60.655.085,00	18,85
						4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 132,228,531	127,021,801	96,06
						4. Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 1,207,128,050	714,134,914	59,16
		Persentase Rata-rata Capaian SasaranStrategis			107,01	Persentase Penyerapan Anggaran			39,01
		Tingkat Efisiensi				107,01-39,01 = 68			



URUSAN PANGAN

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman

Untuk mencapai sasaran strategis ke 2 (dua) urusan Pangan ini telah ditetapkan 1 indikator kinerja yang harus dicapai yaitu : **“Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)”**.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, ketiga aspek tersebut memiliki Sembilan indikator dalam penentuan indeks ketahanan pangan. Aspek ketersediaan pangan dengan indikator Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah. Aspek keterjangkauan pangan dengan indikator Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Aspek pemanfaatan pangan dengan indikator Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Presentase balita stunting, Angka harapan hidup pada saat lahir.

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan :

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j)=\sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

Dimana:

i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9

j : Provinsi ke-1, 2, 3, ... 33, 34

Yj : Indeks Ketahanan Pangan Provinsi

ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator

ke-i



Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada Provinsi ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 3.19). *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 3.21. Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Provinsi
1	$\leq 37,61$
2	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 74,40$

Keterangan : Kelompok 1 : Sangat Rentan
Kelompok 2 : Rentan
Kelompok 3 : Agak Rentan
Kelompok 4 : Agak Tahan
Kelompok 5 : Tahan
Kelompok 6 : Sangat Tahan



Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dilakukan oleh Badan Pangan Nasional baik Kabupaten/Kota/Provinsi sehingga daerah menerima hasil final atas Indeks Ketahanan Pangan (IKP) masih-masih wilayah.

Adapun target Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 62,8 dengan realisasi capaian sebesar 66,29 sehingga Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kelompok Indeks Ketahanan Pangan berada di posisi kelompok 5 yaitu Tahan.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	62,81	66,29	103,65

Sumber data :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan HewanProvinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.23. Perbandingan Indikator Ketahanan (IKP) Pangan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	66,29	63,29	104,74

Berdasarkan Tabel 3.22 di atas, capaian Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 66,29 Indeks di bandingkan target Tahun 2023 sebesar 63,27 Indeks atau mencapai 104,7% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Sedangkan jika di bandingan dengan target akhir RPJM/Renstra 2026 telah tercapai dengan capaian 104,74%. Jika di bandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, IKP Provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 86,99% dari Capaian IKP Nasional

Untuk pencapaian indeks ketahanan pangan tahun 2024 tersebut, didukung oleh beberapa capaian antara lain:

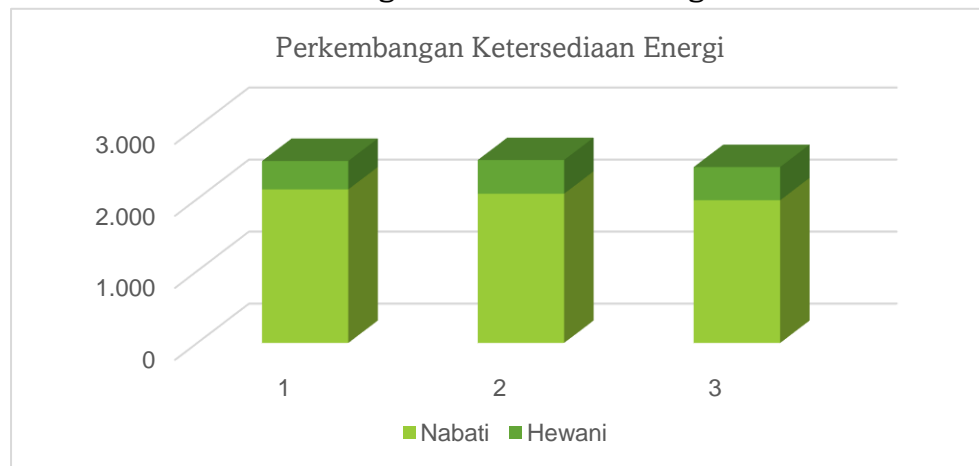


1. Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen;
2. Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan;
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

1. **Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen**

Ketersediaan energi masih didominasi oleh kelompok bahan pangan nabati. Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi tahun 2023 sebesar 81,61 persen tahun 2022 sebesar 84,40 persen. Sedangkan kontribusi bahan pangan hewani terhadap ketersediaan energi tahun 2023 sebesar 18,39 persen dan pada tahun 2022 sebesar 15,59 persen. Perkembangan ketersediaan energi tahun 2022-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 4.2.1 : Perkembangan Ketersediaan Energi Tahun 2022-2024



Catatan: Satuan kkal/kapita/hari

*) Angka Sementara



Tabel 3.24. Perkembangan Ketersediaan Energi Tahun 2022-2024

Ketersediaan	2022	2023	2024*
Energi	2.526	2.539	2.441
Nabati	2.132	2.072	1.981
Hewani	394	467	461

Catatan: Satuan kkal/kapita/hari

*) Angka Sementara

Berdasarkan kelompok bahan makanan, penyumbang ketersediaan energi terbesar tahun 2022-2023-2024 masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Penyumbang ketersediaan energi terbesar berikutnya adalah kelompok minyak dan lemak serta kelompok ikan. Detail kontribusi kelompok bahan makanan terhadap ketersediaan energi sebagaimana tertera pada tabel 3.25.

Tabel 3.25. Ketersediaan Energi Tahun 2022-2024 berdasarkan Kelompok Bahan Makanan

Kelompok Bahan Pangan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
	Energi (Kalori)	%	Energi (Kalori)	%	Energi (Kalori)	%
Padi-padian	1.400	55,42	1.373	54,08	1.341	54,94
Makanan Berpati	48,87	1,93	41	1,61	41	1,68
Gula	85,79	3,40	105,2	4,14	100	4,10
Buah/biji berminyak	130,7	5,17	155,2	6,11	114	4,67
Buah-buahan	45,18	1,79	38,2	1,50	34	1,39
Sayur-sayuran	47,8	1,89	51	2,01	50	2,05
Daging	78,15	3,09	147	5,79	147	6,02
Telur	43,79	1,73	79	3,11	78	3,20
Susu	7,72	0,31	8,2	0,32	5	0,20
Ikan	258,62	10,24	231,2	9,11	228	9,34
Minyak & Lemak	379,66	15,03	310	12,21	303	12,41
Total	2.526	100	2.539	100	2.441	100,00

Sumber Data : NBM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ATAP 2023 di olah

*) Angka sementara



Tabel 3.26. Perkembangan Capaian Kinerja Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Angka Kecukupan energi Tingkat Ketersediaan	124	117,44	119,07

Sumber data :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3.27. Perbandingan Indikator Kinerja Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan	119,07	116	102,65

Berdasarkan Tabel 3.27 di atas, capaian kinerja Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan Tahun 2024 sebesar 119,07%, telah melampaui Target kinerja pada Target Akhir RPJMD/Renstra 2026 yaitu sebesar 116%, atau dengan capaian 102,65% dari target.

Tabel 3.28. Perkembangan Capaian Kinerja Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen ditingkat Konsumen selama 6 tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen	10,19	8,94	11,70	9,01	6,6	7,71	6.10

Sumber data :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau



Bila dilihat data perkembangan Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen selama 6 tahun terakhir terdapat fluktuasi data. Sejak tahun 2018, Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen adalah kurang dari 10, yang berarti harga komoditas pangan pokok stabil karena kurang dari 10%. Pada tahun 2018 dan 2020 Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen lebih dari 10%, yaitu 10,19% dan 11,70% yang berarti harga komoditas pangan pokok tidak stabil sedangkan capaian untuk tahun 2023 Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen adalah kurang dari 10% yaitu 7,71% seperti tabel dibawah.

Tabel 3.29. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2024

No.	Komoditas	Rata-rata Harga (Rp/Kg)	St. DEV	CV (Harga)	Max	Min
1	Tepung Terigu Kemasan (non-curah)	13,207	734	1,04	13.955	13.561
2	Garam Halus Beryodium	11,167	1.414	2,27	11.379	10.641
3	Ikan Bandeng	37,191	2.276	12,83	38.417	27.100
4	Ikan Tongkol	27,547	4,18	4,31	27.968	24.818
5	Ikan Kembung	36,500	1.136	5,13	37.874	32.224
6	Jagung Tk. Peternak	8,014	1.862	4,01	9.270	8.038
7	Minyak Goreng Curah	15,487	345	2,24	14.596	13.402
8	Minyak Goreng	17,133	316	1,80	17.162	16.184
9	Tepung Terigu	10,581	300	1,80	11.653	11.064
10	Gula Pasir (lokal)	154,674	204	6,50	17.060	14.040
11	Daging Sapi Murni	41,348	977	1,06	157.369	151.929
12	Daging Ayam Ras	32,004	1.649	1,18	41.424	39.450
13	Telur Ayam Ras	63,819	478	2,55	32.133	29.576
14	Cabe Merah Keriting	68,906	791	14,51	83.901	53.618
15	Cabe Rawit Merah	38,401	9.389	14,36	92.049	59.697
16	Bawang Merah	154,674	10.222	7,25	42.157	32.970

Sumber data :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Pada sisi suplay, harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan seperti volume produksi, harga internasional dan volume impor. Pada sisi



dimana harga ditentukan oleh dinamika permintaan baik untuk konsumsi maupun permintaan industri, selain itu harga pangan juga dipengaruhi oleh dinamika harga barang substitusi dan komplementernya serta kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Capaian Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan di tahun 2024 sebesar 119.07% dari target sebesar 115%. Ini terlihat dari jumlah ketersediaan lebih besar dibanding kebutuhan pada komoditas bahan pangan strategis di provinsi Kepulauan Riau.

Kebutuhan beras tahun 2024 sebesar 197.751 ton dengan jumlah penduduk provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 2.152.625 orang dengan ketersediaan beras sebesar 256.003 ton sehingga masih surplus sebesar 57.252 ton. Untuk kebutuhan cabe besar tahun 2024 sebesar 11.811 ton dengan ketersediaan yang ada sebesar 18.342 ton sehingga masih ada surplus ketersediaan sebesar 6.531 ton. Untuk daging sapi dengan kebutuhan tahun 2024 sebesar 1.487 ton dengan ketersediaan daging sapi sebesar 1.844 ton sehingga masih surplus ketersediaan sebesar 357 ton. Rata-rata dari 13 (tiga belas) komoditas strategis memiliki neraca positif sehingga ketersediaan komoditas tersebut masih tersedia dan tidak ada kekurangan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.30. Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pokok Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Ton/Tahun).

No.	Komoditas	Kebutuhan		Ketersediaan		Neraca	
		2023	2024*	2023	2024*	2023	2024*
1	Beras	197.751	195.359,48	255.003	208.442,19	57.252	13.082,71
2	Jagung	2.024	3.917,90	2.215	4.263,56	191	345,66
3	Kedelai	14.164	14.138,82	24306	14.830,41	10.142	691,59
4	Bawang Merah	8.354	6.956,79	11.516	7.620,27	3.162	663,48
5	Bawang Putih	5.728	4.744,35	7.347	5.532,71	1.619	788,36
6	Cabe Besar	11.811	11.291,63	18.342	11.398,28	6.531	106,65



7	Cabe Rawit	6.213	6.778,23	6.269	6.799,19	56	20,96
8	Daging Sapi Kerbau	1.487	7.095,93	1.844	7.280,58	357	184,65
9	Daging Ayam Ras	27.377	52.126,96	40.924	61.031,20	13.547	8.904,24
10	Telur Ayam Ras	19.056	44.041,92	29.279	44.344,63	10.223	302,71
11	Gula Pasir	18.023	20.539,21	18.067	23.254,13	44	2.714,92
12	Minyak Goreng	34.229	27.414,41	35222	30.220,50	993	2.806,09

Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Riau

*2024 : Angka Sementara

Pola Pangan Harapan Konsumsi mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah tangga akan berpengaruh pada komposisi konsumsi pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi menjadi salah satu dalam pencapaian ketahanan pangan. Dalam konteks tujuan penyediaan pangan yang cukup dan bermutu bagi pemenuhan kebutuhan gizi penduduk, FAO-RAPA telah merekomendasikan pendekatan PPH dan skor PPH Konsumsi sebagai instrumen penetapan target dan evaluasi pembangunan pangan bagi perbaikan gizi masyarakat di suatu negara atau daerah.

Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Cara Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, untuk menghitung PPH, dapat mengikuti langkah langkah di bawah ini :

1. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok bahan makanan dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan.
2. Menghitung prosentase energi masing-masing kelompok bahan makanan tersebut terhadap total energi (kalori) per hari.
3. Menghitung skor PPH tiap kelompok bahan makanan dengan rumus :



$$\text{PPH} = \% \text{ AKG} \times \text{Bobot}$$

4. Menjumlahkan skor PPH semua kelompok bahan makanan sehingga diperoleh skor PPH.

Kriteria Skor PPH sebagai berikut:

1. Skor PPH < 78 : Segitiga Perunggu, dengan ciri-ciri:

- Energi dari padi-padian dan umbi-umbian masih tinggi diatas normal PPH.
- Energi dari pangan hewani, sayur, dan buah serta kacang-kacangan masih rendah dibawah norma PPH.
- Energi dari minyak dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH.

2. Skor PPH 78- 88 : Segitiga Perak, dengan ciri-ciri:

- Energi dari padi-padian dan umbi-umbian makin menurun, namun masih diatas norma PPH.
- Energi dari pangan hewani, sayur, dan buah masih rendah dibawah norma PPH masing-masing antara 8-12% dan 4-5%.
- Energi dari minyak, kacang-kacangan, dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH.

3. Skor PPH > 88 : Segitiga Emas, dengan ciri-ciri:

- Energi dari padi-padian dan umbi-umbian sedikit diatas norma PPH atau relatif sama.
- Energi dari pangan hewani diatas 12% atau relatif sama dengan norma PPH.
- Energi dari kelompok pangan lain sudah memenuhi norma PPH



Semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Dengan PPH Konsumsi sebagai acuan diharapkan tercapai dua tujuan utama yaitu untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis atau kelompok pangan.

Tabel 3.31. Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88.50	88.76	100,29

Sumber data :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan HewanProvinsi Kepulauan Riau

Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman tahun 2024 dideskripsikan 88.76 bila direview dari angka target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 88.50, maka angka realisasi capaian 100,29%. Angka tersebut menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “**sangat baik**”.

Bila direview tabel seriesnya, setiap tahun Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman mengalami fluktuasi seperti tergambar ditabel dibawah ini :



Tabel 3.32. Perkembangan Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman selama 6 tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87	89,1	89,1	91,9	89,0	89,9	88,76

Sumber data :BPS, diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan HewanProvinsi Kepulauan Riau

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai mengarah kepada beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Tabel 3.33. Perbandingan Capaian Target Indikator Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	119,07	116	102,65
2.	Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) ditingkat Konsumen	6,10	≤11	144,55
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,76	90,10	98,51

Berdasarkan Tabel 3.29. capaian indikator Tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD/Renstra 2026, kecuali Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang baru mencapai 98,51%.

Adapun kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman pada tahun 2024 ini yaitu :

- Pola konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi dalam mengkonsumsi beras, diperlukan intervensi kebijakan di bidang perberasan melalui implementasi prioritas kebijakan yang berbeda satu daerah dengan daerah



lainnya.

- b. Perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye menggalakkan makanan non beras yang telah ada selama ini di berbagai daerah pedesaan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti : Dinas Pangan dan Pertanian, Tim Penggerak PKK dan stakeholders lainnya.
- c. Untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras diperlukan diversifikasi pangan melalui pengembangan teknologi pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi berbagai macam bahan pangan, namun yang terpenting adalah merubah struktur bahan pangan yang dikonsumsi menjadi kecukupan gizi yang berimbang.
- d. Penganekaragaman pangan yang dilakukan bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, tetapi juga untuk peningkatan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Strategis 2 “**Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman**” adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Sasaran Strategis 2 sebesar Rp. 1.984.248.067,10,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.243.318.626,- atau sebesar 62,66%. Rendahnya realisasi keuangan di sebabkan adanya tunda bayar pada Sasaran Strategis 2 sebesar Rp. 355.852.299,-. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman** yang konsisten melalui perbandingan Rata-rata Persentase Capaian sasaran



Strategis dengan persentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.34. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	63,27	66,29	104,77	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.803.507.070,10	1.173.800.426	65,08
						2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 133.571.210	43.616.700	49,27
						3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 47.169.787	25.901.500	54,91
	Persentase Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II				104,77	Persentase Penyerapan Anggaran			62,66
	Tingkat Efisiensi					104,77-62,66= 42,11			



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kategori peringkat dalam penentuan akuntabilitas kinerja instansi seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 3.35 Kategori Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sang Kurang

Sedangkan komponen penilaian manajemen kinerja yang di evaluasi antara lain :

- Perencanaan Kinerja dengan bobot 30;
- Pengukuran Kinerja dengan bobot 30;
- Pelaporan Kinerja dengan bobot 15;
- Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan bobot 25.

Adapun target Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar 76 (BB) dengan realisasi capaian sebesar 86,35 (A).

Tabel 3.36. Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	76	86,35	113,62

Sumber data :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan HewanProvinsi Kepulauan Riau



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja sebesar 86,35 atau memuaskan bahwa instansi pemerintah/unit kinerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkeinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 atau pengawas atau sub kordinator.

Tabel 3.37. Hasil penilaian evaluasi kinerja

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30	25,50
3	Pelaporan kinerja	15	12,60
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	21,25
	Total	100	86,35

Tabel 3.38. Perbandingan Capaian Target Indikator Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Nilai SAKIP	86,35	76	113,62

Berdasarkan Tabel 3.38. capaian indikator Tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD/Renstra 2026, dari yang di targetkan mencapai 113,62%



Tabel 3.39. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP	73,91	84,55	114,4	1 · Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 22,781,760,992	21,048,928,322	92
	Persentase Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III				114,4	Persentase Penyerapan Anggaran			92
	Tingkat Efisiensi					114,44 - 92 = 17,67			



3.3. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau meliputi 2 aspek yaitu Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Belanja Daerah SKPD.

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SKPD

Untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah.

Upaya-upaya yang tetap dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Kontribusi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi UPT Puskesmas dan UPT Balai Benih Induk berasal dari beberapa pelayanan yakni:

1. Pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak ekspor;
2. Pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
3. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
4. Pemeriksaan pusat/klinik kesehatan hewan.
5. Sertifikasi benih.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan rencana pendapatan/penerimaan yang menjadi sumbangsih untuk retribusi daerah (PAD) sebesar Rp. 133.906.900,-. atau sekitar 34,75%.



Tabel 3.40. Perkembangan PAD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.tahun 2011 – 2023.

Tahun	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	%
2011	100.000.000	159.091.500	159,09
2012	100.000.000	182.240.500	182,24
2013	100.000.000	214.931.000	210,33
2014	150.000.000	303.647.950	214,93
2015	165.000.000	362.834.000	219,90
2016	305.000.000	282.641.500	92,67
2017	550.000.000	664.878.250	120,88
2018	202.000.000	262.928.750	130,16
2019	215.000.000	334.058.000	155,38
2020	230.000.000	332.912.000	144,74
2021	330.000.000	345.479.850	104,69
2022	300.000.000	351.614.540	117,20
2023	385.387.254	183.403.207	47,59
2024	385.387.254	133.906.900	34,75

2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH SKPD

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Murni Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesarRp. 43,406,651,879- kemudian APBD-P sebesar Rp. 41,500,804,244,- dan realisasi anggaran 2024 sebesar Rp. 29,519,809,569,- dengan jumlah program sebanyak 8 (delapan) program sebagai berikut :



Tabel 3.41. Program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

NO	UNIT / PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
I	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22,781,760,992
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,803,507,070
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	133,571,210
4	Program Pengawasan Keamanan pangan	47,169,787
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,220,511,000
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,810,162,336
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	68,044,710
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132,228,531
9	Program Penyuluhan Pertanian	1,207,128,050
II	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	311,328,329
2	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253,735,258
III	UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	467,062,509
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	703.334.398
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,324,061,450
JUMLAH		41,500,804,244



Tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 8 (delapan) program dan 60 Sub Kegiatan. Tabel Program dan kegiatan tahun anggaran 2024 sebelum dan setelah perubahan sebagai berikut :

Tabel 3.42. Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 sebelum dan setelah perubahan

No.	Kode	Kegiatan Sub Kegiatan	Murni	Perubahan
			Pagu	Pagu
1	2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	38,109,931,321	36,204,083,686
3	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	301.623.326	295.133.208.4
4	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	181.487.584	162.576.208.4
5	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.135.742	132,557,000
6	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.851.461.419	18,225,375,344
7	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.181.077.419	17,559,521,344
8	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	670.384.000	665,854,000
9	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892.304.385	885,869,937
10	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.624.812	7,624,812
11	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.356.992	242,922,544
12	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.147.731	121,147,731
13	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.761.110	9,761,110
14	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.968.360	7,968,360
15	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.723.000	42,723,000
16	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.722.380	453,722,380
17	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	521,906,000
18	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	521,906,000
19	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.219.910.581	2,196,470,493
20	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.615.550	12,615,550
21	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.087.215	99,567,215
22	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.713.240	46,713,240
23	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.035.494.576	2,037,574,488
24	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.754.810	657,006,010
25	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	361.124.500	385,375,700
26	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.360.000	74,360,000
27	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.270.310	197,270,310



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



29	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.170.692.008	1,159,164,454
30	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.124.239.372	1,112,711,818
31	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	23.129.636	23,129,636
32	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	23.323.000	23,323,000
33	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1.493.816.336	391,968,956
34	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	56.446.956	56,446,956
35	2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.437.369.380	335,522,000
36	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	262.914.635	252,373,660
37	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	262.914.635	252,373,660
39	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	31.262.010	22,732,010
40	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	31.262.010	22,732,010
41	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	110.839.200	110,839,200
42	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.707.500	50,707,500
43	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	60.131.700	60,131,700
45	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	53.579.787	47,169,787
46	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	29.422.793	29,422,793
47	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	24.156.994	17,746,994
49	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.427.779.432	5,066,233,487
50	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.427.779.432	5,066,233,487
51	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.403.748.913	1,154,277,513
52	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	2.403.748.913	1,154,277,513
54	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.137.909.455	3,810,162,336
55	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	623.196.950	695,462,750
56	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	3.514.712.505	3,114,699,586
58	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	153.149.940	49,252,085
59	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	153.149.940	49,252,085
60	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	18.792.625	18,792,625
61	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18.792.625	18,792,625
63	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	92.215.531	132,228,531
64	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	92.215.531	132,228,531
66	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.855.176.928	1,207,128,050
67	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.855.176.928	1,207,128,050



68	2.09.3.27.0.00.09.0002	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN	565,063,587	565,063,587
70	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.544.475	84,544,475
71	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.006.700	2,006,700
72	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.400	6,000,400
73	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.500	2,000,500
74	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	58.000.875	58,000,875
75	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.536.000	16,536,000
76	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.769.189	141,769,189
77	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.214.125	107,586,893
78	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.555.064	34,182,296
79	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.014.665	85,014,665
80	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.145.765	29,145,765
81	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.987.500	48,987,500
82	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.881.400	6,881,400
84	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	253.735.258	253,735,258
85	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.735.258	253,735,258
86	2.09.3.27.0.00.09.0001	UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)	4,731,656,971	4,731,656,971
88	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.735.805	49,557,461
89	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.266.792	4,266,792
90	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.910.744	11,910,744
91	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.993.351	9,993,351
92	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.244.800	2,244,800
93	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.145.518	3,145,518
94	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.174.600	17,996,256
95	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.004.854	30,004,854
96	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.004.854	30,004,854
97	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.041.800	287,220,144
98	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.041.800	92,041,800
99	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.000.000	195,178,344
100	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.280.050	100,280,050
101	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.301.250	67,301,250
102	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.320.000	31,320,000
103	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.658.800	1,658,800



105	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	940.533.012	940,533,012
106	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	40.700.776	40,700,776
107	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	899.832.236	899,832,236
109	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.324.061.450	3,324,061,450
110	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	0	874,166,100
111	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3.324.061.450	2,449,895,350

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN FISIK

Alokasi anggaran APBD Perubahan untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 41,500,804,244,- dengan realisasi sebesar Rp 29,519,809,569 (71.13%) dengan realisasi fisik sebesar 81.34%.

Tabel 3.43. Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

NO	UNIT / PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		FISIK (%)
			(Rp)	(%)	
I	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIANDAN KESEHATAN HEWAN				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.781.760.992	21,048,928,322	92	100
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,803,507,070	1,173,800,426	65	100
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	133,571,210	43,616,700	33	100
4	Program Pengawasan Keamanan pangan	47,169,787	25,901,500	55	100
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,220,511,000	1,084,842,000	17	100
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,810,162,336	381,154,421	10	87
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	68,044,710	44,613,085	66	74
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132,228,531	127,021,801	96	100
9	Program Penyuluhan Pertanian	1,207,128,050	714,134,914	59	100
II	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	311,328,329	222,587,394	71	77
2	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253,735,258	16,042,000	6	34,4
III	UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN				



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	467,062,509	462,414,555	99	100
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	940,533,012	917,040,170	98	100
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,324,061,450	3,257,712,281	98	100
	JUMLAH	41,500,804,244	29,519,809,569	71.13	100



PROGRAM DAN KEGIATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJANEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2023

Kebijakan pertanian dan ketahanan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu

:

1. Aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada:
 - (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan
 - (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
2. Aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:
 - (a) stabilisasi harga dan pasokan pangan; serta
 - (b) pengelolaan cadangan pangan.
3. Aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:
 - (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan
 - (b) pengawasan keamanan pangan segar.
4. Aspek pertanian, difokuskan pada :
 - (a) peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
 - (c) meningkatkan peran serta petani dan peternak dalam pembangunan pertanian
 - (d) peningkatan sarana dan prasarana pertanian
 - (e) pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung pengembangan pertanian dalam arti luas.



REALISASI PELAKSANAAN APBN

Tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Dari seluruh DIPA APBN yang merupakan Tugas Pembantuan (TP) yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan



Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh total pagu anggaran sebesar RP. 1,566,615,000,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,076,849,818,- atau secara persentase keuangan 68.74% dan realisasi secara fisik kegiatan 100,00 %. Realisasi keuangan dan fisik Dana Tugas Pembantuan (TP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sedangkan dana Dekonsentrasi (DK) pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 4,229,675,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4,050,242,630,- secara persentase keuangan 95.76 % dan realisasi secara fisik kegiatan 100,00%. Realisasi Fisik dan keuangan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dari Dana APBN Tahun Anggaran 2024 Dana Dekonsentrasi (DK) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.44. Realisasi Kuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi (DK) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

No	Nomor DIPA	Kementerian/ Direktorat	Program	Kegiatan		Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	Lokasi	
							Rp	%	%	Rp.		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1.	SP DIPA-018.04.3.329026 /2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN HORTIKULTUR A	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1	Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura	29.928.000	29.877.800	99,83		50.200	Provinsi Kepulauan Riau	
				1.1	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	29.928.000	29.877.800	99,83	100,00	50.200		
			Dukungan Manajemen	2	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	205.208.000	205.063.390	99,93		144.610		
				2.1	Layanan Data dan Informasi	97.608.000	97.530.400	99,92	100,00	77.600		
				2.2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	65.100.000	65.032.990	99,90	100,00	67.010		
				2.3	Layanan Manajemen Keuangan	42.500.000	42.500.000	100,00	100,00	0		
				Total		235.136.000	234.941.190	99,92		194.810		
2	SP DIPA-018.018.05.3.32 9027/2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN PERKEBUNAN	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1	Penguatan Perlindungan Perkebunan	54.400.000	33.978.500	62,46		20.421.500	Provinsi Kepulauan Riau	
				1.1	Perangkat Perlindungan Perkebunan	54.400.000	33.978.500	62,46	100,00	20.421.500		
			Dukungan Manajemen	2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	342.020.000	259.482.449	75,87		82.537.551		
				2.1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	342.020.000	259.482.449	75,87	100,00	82.537.551		
				Total		396.420.000	293.460.949	74,03		102.959.051		
3	SP DIPA-018.08.3.329030 /2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN	Dukungan Manajemen	1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	75.000.000	65.635.200	87,51		9.364.800	Provinsi Kepulauan Riau	



		PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		1.1	Layanan Manajemen Keuangan	75.000.000	65.635.200	87,51	100,00	9.364.800	
				Total		75.000.000	65.635.200	87,51		9.364.800	
4	DIPA 018.03.329054/2 023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN TANAMAN PANGAN	Ketersediaan,Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	30.000.000	29.440.000	98,13		560.000	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Peredaran Benih Tanaman Pangan yang diawasi	30.000.000	29.440.000	98,13	100,00	560.000	
				2.	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	78.000.000	77.590.000	99,47		410.000	
				2.1	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	78.000.000	77.590.000	99,47	100,00	410.000	
			Dukungan Manajemen	3.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan	47.400.000	47.400.000	100,00		0	
				3.1	Layanan Manajemen Keuangan	47.400.000	47.400.000	100,00	100,00	0	
				Total		155.400.000	154.430.000	99,38		970.000	
5	SP DIPA- 018.10.3.418019 /2022	KEMENTERIAN PERTANIAN - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	383.506.000	381.896.000	99,58		1.610.000	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Provinsi	100.000.000	99.994.000	99,99	100,00	6.000	
				1.2	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	283.506.000	281.902.000	99,43	100,00	1.604.000	
				Total		383.506.000	381.896.000	99,58		1.610.000	
6	SP DIPA- 125.01.3.690729 /2023	BADAN PANGAN NASIONAL	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1.184.733.000	1.168.547.230	98,63		16.185.770	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	216.250.000	211.765.910	97,93	100,00	4.484.090	
				1.2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan pelaporan Stabilitas Pasokan dan Harga pangan	741.130.000	739.367.925	99,76	100,00	1.762.075	



				1.3	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	147.453.000	137.664.531	93,36	100,00	9.788.469	
				1.4	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	79.900.000	79.748.864	99,81	100,00	151.136	
				2.	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	387.300.000	368.360.402	95,11		18.939.598	
				2.1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	235.500.000	227.670.079	96,68	100,00	7.829.921	
				2.2	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengendalian Kerawanan Pangan	50.000.000	49.625.490	99,25	100,00	374.510	
				2.3	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	101.800.000	91.064.833	89,45	100,00	10.735.167	
				3.	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.225.500.000	1.208.267.503	98,59		17.232.497	
				3.1	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	172.000.000	168.131.700	97,75	100,00	3.868.300	
				3.2	Sertifikasi sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	180.000.000	178.408.300	99,12	100,00	1.591.700	
				3.3	Promosi Pangan B2SA	197.000.000	195.860.302	99,42	100,00	1.139.698	
				3.4	Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan (Pengembangan Desa B2SA)	576.500.000	567.254.501	98,40	100,00	9.245.499	
				3.5	Pangan Segar yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan	100.000.000	98.612.700	98,61	100,00	1.387.300	
			Dukungan Manajemen	4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	186.680.000	174.704.156	93,58		11.975.844	
				4.1	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	186.680.000	174.704.156	93,58	100,00	11.975.844	
				Total		2.984.213.000	2.919.879.291	97,84		64.333.709	
JUMLAH DANA DEKONSENTRASI (DK)					4.229.675.000	4.050.242.630	95,76		179.432.370		



Tabel 3.44. Realisasi Kuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan (TP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

No	Nomor DIPA	Direktorat/ Kementerian	Program	Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	Lokasi
							Rp	%	%	%	
1	SP DIPA- 018.05.4.329079/ 2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN PERKEBUNAN	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	302.630.000	71.269.100	23,55		231.360.900	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	75.000.000	60.983.600	81,31	100,0	14.016.400	
				1.2	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	227.630.000	10.285.500	4,52	10,0	217.344.500	
				2.	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	289.267.000	241.151.468	83,37		48.115.532	
				2.1	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	69.170.000	67.824.810	98,06	100,0	1.345.190	
				2.2	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	220.097.000	173.326.658	78,75	100,0	46.770.342	
			Dukungan Manajemen	3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	107.980.000	92.393.800	85,57		15.586.200	
				3.1	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	107.980.000	92.393.800	85,57	100,0	15.586.200	
				Total		699.877.000	404.814.368	57,84		295.062.632	
2	SP DIPA- 018.06.4.329080/ 2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.	Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	80.000.000	77.980.400	97,48		2.019.600	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	80.000.000	77.980.400	97,48	100,00	2.019.600	
			Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	25.000.000	25.000.000	100,00		-	
				2.1	Layanan Kesehatan Hewan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	-	



				3.	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	109.520.000	107.994.800	98,61		1.525.200	
				3.1	Layanan Optimalisasi Reproduksi	106.400.000	104.874.800	98,57	100,00	1.525.200	
				3.2	Ternak yang Didata dan Ditandai	3.120.000	3.120.000	100,00	100,00	-	
				4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	79.522.000	78.314.000	98,48		1.208.000	
				4.1	Layanan BMN	-				-	
				4.2	Layanan Data dan Informasi	15.900.000	14.875.100	93,55	100,00	1.024.900	
				4.3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	22.068.000	21.947.000	99,45	100,00	121.000	
				4.4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-					
				4.5	Layanan Manajemen Keuangan	41.554.000	41.491.900	99,85	100,00	62.100	
				Total		294.042.000	289.289.200	98,38		4.752.800	
4	DIPA-018.08.4.329082/2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Dukungan dan Manajemen	1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	101.546.000	0	0,00		101.546.000	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Layanan Manajemen Keuangan	101.546.000	0	0,00	0,00	101.546.000	
				Total		101.546.000	0	0,00		101.546.000	
5	SP DIPA-018.03.4.329077/2023	KEMENTERIAN PERTANIAN - DITJEN TANAMAN PANGAN	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.	Pengelolaan produksi tanaman serelia tanaman pangan	219.000.000	207.266.000	94,64		11.734.000	Provinsi Kepulauan Riau
				1.1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Evaluasi	17.500.000	16.971.000	96,98	100	529.000	
				1.2	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	201.500.000	190.295.000	94,44		11.205.000	
					- Bantuan Benih Padi (25 Kg/Ha)	47.450.000	36.375.000	76,66	100	11.075.000	
					- Bantuan Pupuk NPK Non Subsidi (100 Kg/Ha)	131.300.000	131.235.000	99,95	100	65.000	
					- Bantuan Pestisida (1 Paket/Ha)	22.750.000	22.685.000	99,71	100	65.000	
				2.	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	35.200.000	13.056.250	37,09		22.143.750	
				2.1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Evaluasi	1.200.000	1.200.000	100,00	100	0	



			Program Dukungan Manajemen	2.2	Area Penyaluran Benih Padi	34.000.000	11.856.250	34,87		22.143.750	
					- Bantuan Benih Padi (100 Ha x 25 Kg)	34.000.000	11.856.250	34,87	35	22.143.750	
				3.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	216.950.000	162.424.000	74,87		54.526.000	
				3.1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16.344.000	14.090.000	86,21	100	2.254.000	
				3.2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	87.606.000	40.029.000	45,69	100	47.577.000	
				3.3	Layanan Manajemen Keuangan	113.000.000	108.305.000	95,85	100	4.695.000	
				Total		471.150.000	382.746.250	81,24		88.403.750	
				JUMLAH DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)					1.566.615.000	1.076.849.818	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, memuat pertanggung jawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD dan APBN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2021–2026.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2024 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya terhadap pencapaian RENSTRA. Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, setidaknya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan OPD, khususnya dalam Renstra dan Renja 2024, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Penerapan sistem *e-performance* yang di koordinir oleh tim APIP Provinsi Kepulauan menunjukkan upaya yang lebih maju dalam mensinergikan perencanaan dan laporan capaian kinerja secara transparan,



Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian dan pangan dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut : Alokasi anggaran APBD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan pada tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 41,500,804,244,- dengan realisasi sebesar Rp 29,519,809,569 (71.13%) dengan realisasi fisik sebesar 81.34%.**

A. Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana APBD pada tahun 2024, yang realisasinya di bawah 80% antara lain :

1. Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian, dengan realisasi 21%. Secara fisik kegiatan sdh dilaksanakan 76 %, namun keuangan tdk mencapai 100% karena 1. Karena adanya tunda bayar.
2. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan Pakan dengan realisasi 1 %. Tidak jadi dilakukan pengadaan bibit sapi
3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan realisasi 59,54%. Pagu pengadaan Rp. 7.505.348,- untuk 25 Botol). Sedangkan harga yang tertera di Ekatalog adalah harga per liter yaitu sebesar Rp. 266.000 dengan kemasan per botol 500ml @ tidak ada yang per 1 liter. (belum termasuk ongkir) Sehingga outputnya 25 botol setara dengan 12,5 liter



Sektor pertanian masih banyak penataan baik dari alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, lahan, benih atau bibit, kelembagaan, pembiayaan karena beberapa kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayuran didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor, akibat ketersediaan lahan terbatas, kondisi tanah kurang subur, daya dukung irigasi pertanian yang kurang, minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah, jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan. Kelembagaan pertanian yang belum tertata dengan baik dan pembiayaan sektor pertanian yang masih rendah, belum optimalnya produksi bibit atau benih unggul bersertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan bibit tau benih di Provinsi Kepulauan Riau dan tingginya resiko Kepulauan Riau terkena OPT akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian.

Sedangkan Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan urusan Pangan dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Beras sebagai komoditas utama ketersediaannya masih tergantung dari daerah lain;
2. Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan belummemadai;
3. Teknologi pengolahan pangan dan tepat guna pertanian lokal masih belum berkembang;
4. Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih terbatas;
5. Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah;
6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian.
7. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola program dan kegiatan lingkup pertanian secara menyeluruh.



Solusi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Aspek Anggaran Program/Kegiatan

- Melakukan Percepatan Belanja Barang /jasa di Tiap-tiap Program Kegiatan dan sub kegiatan.
- Pencermatan dalam Penganggaran Kegiatan dan sub kegiatan sehingga dampak efisiensi Anggaran tidak mempengaruhi Serapan anggaran maupun Output Kegiatan dan sub kegiatan.
- Mensinergiskan Program Kegiatan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga diharapkan permasalahan teknis di lapangan dapat dikurangi.

2) Aspek Sarana Prasarana dan Penyuluhan

- Membangun embung, sumur resapan dan pengembangan sumber airatau melalui pipanisasi.
- Bantuan pupuk bersubsidi, pengadaan pupuk dan pestisida, alat mesin pertanian (alsintan) serta pemberdayaan kios saprodi pertanian.
- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
- Penguatan modal petani melalui pembiayaan pertanian.
- Penguatan kelembagaan petani baik penyuluh maupun kelompok tani..

3) Aspek Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Produksi bibit atau bernih unggul bermutu di Balai Benih Induk (BBI),
- Memperkuat kelembagaan petani yag ada dengan badan hukum.
- Melatih petani dalam pemanfaatan teknologi agar produk yang dihasilkanditerima masyarakat dalam negeri atau luar negeri.
- Penerapan GAP dan GHP yang baik agar produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura meningkat dengan kualitas yang baik.
- Memperkuat modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Pengendalian OPT dan bencana tanaman pangan dan hortikultura.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mendatangkan transmigrasi guna menambah jumlah penduduk setempat.

4) Aspek Perkebunan



- Memperluas pasar komoditas perkebunan baik didalam maupun luar negeri terutama karet, cengkeh, kelapa dan kelapa sawit.
- Optimalisasi Sumberdaya lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan baik melalui penataan, peremajaan maupun perluasantanaman perkebunan.
- Penumbuhan usaha penangkaran benih atau bibit unggul dan pengelolaan pasca panen komoditas perkebunan.
- Penumbuhan industri komoditas perkebunan dalam negeri, sehingga harga dapat dikendalikan dan petani dapat meningkat penghasilannya.
- Pengendalian OPT dan bencana tanaman perkebunan.

5) Aspek Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Optimalisasi lahan pakan ternak untuk pengembangan populasi ternak.
- Operasional Sentra Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) diharapkan dapat meningkatkan jumlah maupun mutu ternak dimana penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat.
- Pengendalian terhadap penyakit ternak.
- Operasional kesejahteraan hewan dan pengendalian pelanggaran kesejahteraan hewan.
- Operasional Laboratorium Pakan Ternak saat ini diharapkan dapat menjadi sarana tempat pengujian pakan dan bahan baku pakan ternak untuk dapat mengawasi peredaran pakan ternak di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dihindari terjadinya penyimpangan yang pada hakikatnya akan menurunkan kualitas pakan, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas ternak dan keamanan produk pangan yang dihasilkan.
- Operasional Puskesmas dan Laboratorium pendukungnya, yang merupakan salah satu lembaga pelayanan di sub sektor peternakan berfungsi sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan yang mempunyai tugas pokok



melakukan pelayanan di wilayah pedesaan atau kecamatan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan bidang kesehatan hewan. pelayanan yang diberikan oleh puskesmas ditujukan untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kualitas status kesehatan hewan atau ternak agar produktifitasnya dan reproduktivitas daripada ternak dapat optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari pada peternak itu sendiri.

Sedangkan dari sisi Urusan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L);
2. Kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan;
3. Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional,
4. Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep P2L;

Implementasi kebijakan pertanian tersebut dituangkan dalam kebijakan operasional yang ditetapkan yaitu :

1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan peningkatan ketersediaan pangan dan gizi berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah / daerah.
2. Memberikan pembinaan terhadap mutu dan keamanan pangan.
3. Mengembangkan pola konsumsi pangan masyarakat dan penganeekaragaman pangan dan gizi menuju Pola Pangan Harapan.
4. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat petani guna meningkatkan keterampilan dan penggunaan teknologi tepat guna secara optimal.
5. Mendukung pemanfaatan sumber daya pertanian lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang berdaya saing.
6. Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi masyarakat



7. Memberikan dukungan terhadap peran serta aparaturnya dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan pertanian

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi horisontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir dan diantisipasi sebagaimana mestinya.

Akhirnya segenap aparat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa yang akan datang.